

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan mengacu pada suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (2017), kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua jenis: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut berkorelasi langsung dengan tingkat pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang penting untuk mempertahankan standar hidup yang memuaskan. Sebaliknya, kemiskinan relatif timbul akibat rencana pembangunan yang tidak mencakup semua sektor masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Indonesia, seperti negara-negara berkembang lainnya, terus menghadapi hambatan berupa kemiskinan yang berkepanjangan.

Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan karena sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah berupaya bersama dan bertekad untuk mengatasi masalah ini. Jika dicermati statistik Badan Pusat Statistik, terlihat adanya variasi angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2017 hingga Maret 2021 secara nasional..

Tabel 1.1. Angka Kemiskinan Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Angka Kemiskinan	Persentase/Persen
1	2017	27.771.220 Jiwa	10,64
2	2017	26.582.990 Jiwa	10,12
3	2018	25.949.800 Jiwa	9,82
4	2018	25.674.580 Jiwa	9,66
5	2019	25.144.720 Jiwa	9,41
6	2019	24.785.870 Jiwa	9,22
7	2020	26.424.020 Jiwa	9,78
8	2020	27.549.690 Jiwa	10,19
9	2021	27.542.770 Jiwa	10,14
10	2021	26.503.650 Jiwa	9,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan sajian tabel di atas dapat dijelaskan angka penduduk miskin di Indonesia berkurang menjadi 26,5 juta jiwa pada tahun 2021. Jika melihat pada bulan tahun 2020, jumlah penduduk miskin juga berkurang 1,05 juta jiwa. Menurut data yang disajikan pada tabel di atas juga dijelaskan meskipun angka kemiskinan menurun tetapi angka kemiskinan masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19 melanda. Jika berdasarkan data dari tabel, bisa diasumsikan pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan masih belum maksimal, dikarenakan presentase kemiskinan masih berada di angka 9-10%.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pelayanan publik. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini pada

dasarnya memberikan kabar yang baik bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Peran pemerintah dalam kasus ini sangat penting mengingat berbagai kebijakan serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah dijadikan patokan atau acuan dalam mendorong pemberantasan kemiskinan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan sepatutnya melakukan berbagai cara agar kemiskinan di setiap daerah dapat diberantas dengan secara maksimal.

Awal mula pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Adapun maksud atau tujuan diciptakan undang-undang tersebut bahwa penanganan fakir miskin dapat dilakukan secara terarah, terpadu serta berkelanjutan, di mana penanganan tersebut harus dijalankan oleh pemerintah baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai bentuk penanganan fakir miskin dapat berupa kebijakan, kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan memfasilitasi kebutuhan hidup setiap warga. Adapun penerapan kebijakan ini harus dilakukan berdasarkan asas-asas kemanusiaan, keadilan sosial, dan *non diskriminasi*. Salah satu cara pemerintah agar dapat menanggulangi kemiskinan dengan secara maksimal adalah membuat kebijakan yang berbasis perlindungan sosial (Anggleni, 2018).

Tabel 1.2. Angka Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Angka Kemiskinan(ribu/jiwa)
1	2020	3 980,90
2	2021	4 109,75
3	2022	4 109,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2022

Salah satu wilayah di Indonesia yang masih memiliki masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah Provinsi Jawa Tengah (Wahyudi & Tri, 2013). Berdasarkan sajian tabel 1.2, jumlah penduduk Jawa Tengah yang hidup dibawah garis kemiskinan berjumlah 3989,90 ribu jiwa pada tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan hingga berjumlah 4 109,75 jiwa. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan mencapai 11,79 persen.

Strategi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan diperkenalkannya Kartu Jawa Tengah Sejahtera, yang merupakan pionir inisiatif kebijakan dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengentasan Kemiskinan, berupaya menanggulangi kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan melalui pendekatan yang terfokus dan menyeluruh. Peran ini mencakup tingkat pemerintahan nasional dan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 untuk memenuhi

kerangka hukum. Peraturan ini mengatur pemberian Bantuan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera.

Kabupaten Kendal mendapat prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di antara seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Pemkab Kendal, angka kemiskinan di wilayah tersebut berjumlah 409.193 jiwa pada tahun 2021. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan total ada 8.874 jiwa yang tergolong miskin di berbagai desa dalam wilayah Kabupaten Kendal. Berdasarkan informasi di website Pemkab Kendal, angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kendal mencapai 409.193 jiwa pada tahun 2021. Selanjutnya, terdapat data penerima Kartu Jateng Sejahtera di Kabupaten Kendal.

Tabel 1.3. Data Penerima Bantuan Kartu Jawa Tengah Sejahtera Kabupaten Kendal

No	Nama Desa	Jumlah Penerima KJTS
1	Banjarejo	4
2	Bebengan	4
3	Blimbing	1
4	Boja	7
5	Kaligading	1
6	Karangmanggis	2
7	Kliris	3
8	Medono	1
9	Meteseh	5
10	Ngabean	3
11	Pasigitan	7
12	Salamsari	5
	Jumlah	47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2022

Tabel 1.4 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal dengan penerima Kartu Jateng Sejahtera yang sebenarnya. Perbedaan ini cukup menonjol mengingat peraturan tersebut menetapkan bahwa semua masyarakat miskin dan tidak produktif berhak menerima kartu tersebut. Data pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal melebihi 8 ribu jiwa, semakin menegaskan besarnya permasalahan yang ada. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 mencerminkan komitmen untuk mengatasi kemiskinan dan membantu mereka yang tidak produktif melalui pembagian Kartu Jateng Sejahtera (BPS, 2022). Namun, perbedaan antara cakupan yang diharapkan dan jumlah penerima sebenarnya, seperti yang ditunjukkan oleh wawancara pribadi yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan potensi tantangan atau inefisiensi dalam proses implementasi.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan ini, seperti masalah administratif, tantangan dalam mengidentifikasi penerima yang memenuhi syarat, atau masalah dalam proses distribusi. Penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui akar penyebab kesenjangan tersebut dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pelaksanaan program Kartu Jateng Sejahtera di Kabupaten Kendal. Selain itu, jumlah penerima kartu yang berjumlah 47 orang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program dalam menjangkau khalayak sasaran. Situasi ini menyoroti perlunya evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan program, termasuk penilaian terhadap kriteria

yang digunakan untuk menentukan kelayakan, proses distribusi, dan tantangan apa pun yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan program.

Pemilihan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian pelaksanaan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) tahun 2020 hingga 2022 dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut dan kesenjangan antara jumlah penduduk miskin dan penerima. Kartu Jateng Sejahtera. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 409.193 jiwa pada tahun 2021 dan lebih dari 8.000 jiwa tergolong miskin di berbagai desa, wilayah ini menghadapi masalah kemiskinan yang cukup besar. Besarnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal menunjukkan perlunya upaya pengentasan kemiskinan yang efektif, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 yang merupakan wujud komitmen penanggulangan kemiskinan dan membantu masyarakat tidak produktif melalui pembagian Kartu Jateng Sejahtera.

Maka dari itu kesenjangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal dengan terbatasnya penerima Kartu Jateng Sejahtera menunjukkan potensi permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Investigasi dan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa program tersebut secara efektif menjangkau penerima manfaat sesuai dengan kerangka peraturan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian hendak dilakukan untuk menganalisis implementasi lapangan terkait program kebijakan Kartu Jawa Tengah Sejahtera, khususnya di Kabupaten Kendal. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara perkembangan berjalannya kebijakan Kartu Jawa Tengah Sejahtera di Kabupaten Kendal.

1.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4. Penelitian Terdahulu

Judul (1)	Artikel dan Pengarang (2)	Tujuan (3)	Temuan (4)
Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone	Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020).	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program pengembangan komoditas pada wilayah strategis di Kabupaten Bone.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Kawasan Strategis di Kabupaten Bone sudah baik, hal ini terlihat dari kerjasama para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya namun terdapat kesulitan yang didapat oleh pemerintah khususnya dalam hal memberikan data dan informasi mengenai komoditas unggulan yang dimiliki oleh CWC. Program pengembangan komoditas di CWC Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Palakka, Awangpone dan Barebbo sangat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan adanya program ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mengembangkan komoditas unggulan di wilayah CWC telah terealisasi. di kawasan CWC.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut.	Kristian, I. (2022).	Tujuan dari Penelitian ini untuk mengatasi permasalahan yang ada mengenai adanya penyaluran bantuan PKH yang belum tepat sasaran,	Temuan penelitian terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan mengungkapkan adanya tantangan dalam komunikasi pendamping akibat kurang memadainya sinyal telekomunikasi di seluruh kecamatan. Meskipun ada pendamping PKH yang kompeten, efektivitasnya masih terhambat,

		<p>kurangnya pendampingan, serta komunikasi tidak berjalan dengan lancar dengan pisau analisis menggunakan teori dari Edward III tentang Implementasi Kebijakan.</p>	<p>terutama bagi KPM yang berada di daerah terpencil. Selain itu, terdapat kesulitan dalam memberikan saran kepada KPM kaya untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PKH. Namun, fasilitator mengupayakan distribusi bantuan tepat sasaran. Untungnya, upaya kolaboratif antara aparat kecamatan dan desa, serta tokoh masyarakat, dapat menjamin kelancaran pelaksanaan bantuan PKH.</p>
<p>Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP).</p>	<p>Rakista, P. M. (2020).</p>	<p>Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan.</p>	<p>Implementasi kebijakan publik bertujuan untuk mencapai tujuan program pemerintah. Program Indonesia Pintar memberikan bantuan tunai kepada anak-anak usia sekolah yang kurang mampu, yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi mereka yang berusia 6 hingga 21 tahun, mencegah putus sekolah, dan melibatkan kembali mereka yang putus sekolah. Penelitian yang berfokus pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas ini menggunakan metode kualitatif dan analisis interaktif. Temuan menunjukkan keberhasilan implementasi, karena program mematuhi tujuan dan SOP.</p>
<p>Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak.</p>	<p>Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020).</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana pembagian bantuan di desa ini sesuai dengan regulasi pemerintah.</p>	<p>Hasil dari survei terbaru menunjukkan bahwa 80% warga Cibadak merasa haknya sebagai warga negara telah terpenuhi melalui bantuan terdampak COVID-19. Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Cibadak dilakukan dengan ketentuan, termasuk penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga yang identitas atau</p>

			domisilinya tercatat di Desa Cibadak. Selain itu, pemilik Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) diizinkan menerima BLT, terutama bagi warga tidak tetap atau pendatang baru yang tinggal dalam rumah kontrak di Cibadak.
Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Puskesmas Kresek, Kabupaten Tangerang.	Ernawati, K., Fadilah, M. R., Rachman, M. A., Nadira, C., Sartika, P. A. J., Jannah, F., & Komalasari, R. (2022).	Tujuan penelitian ini adalah analisis implementasi kebijakan program pengendalian Demam Berdarah Dengue di Puskesmas Kresek, kabupaten Tangerang terutama terkait dengan GR1J1.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus DBD pada tahun 2021 mencapai 12 kasus, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 19 kasus. Dalam pemantauan jentik, hanya dua desa, yaitu Pasir Ampo dan Koper, yang berhasil mencapai Angka Bebas Jentik (ABJ) sesuai target (>95%) pada tahun 2021. Pada tahun 2022, desa Patrasana dan desa Koper juga mencapai target ABJ yang sama. Hasil wawancara mendalam mengungkapkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan program, antara lain keterbatasan jumlah staf pada program penanganan DBD, keterbatasan alat yang memadai, jumlah kader jumentik yang terbatas, dan belum terlaksananya program G1R1J.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Kendal?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi implementasi kebijakan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Kendal.
2. Mengidentifikasi hal-hal yang mendukung dan menghambat implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumber pengetahuan, informasi atau wawasan mengenai proses distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera, sehingga mampu berkontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial khususnya di dalam kajian ilmu pemerintahan. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menciptakan konsep berpikir yang akan dijadikan fondasi bagi penelitian selanjutnya di bidang Kebijakan Publik terutama dalam hal Implementasi Kebijakan Kartu Jawa Tengah Sejahtera di wilayah Kabupaten Kendal.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini peneliti berharap mampu memberikan manfaat dan saran bagi pemangku kebijakan publik dan pemerintah berkaitan dengan implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera di Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di

Kabupaten Kendal.

2. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dalam memperluas wawasan serta pengetahuan pada kajian ilmu pemerintahan khususnya mengenai proses implementasi Kebijakan Kartu Jawa Tengah Sejahtera dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang juga suatu saat akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi.

3. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan tambahan wawasan serta ilmu baik dalam bentuk teori maupun praktis. Selain itu, peneliti juga berharap pengalaman melalui penelitian ini mampu bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan peneliti.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Implementasi Kebijakan Publik

1.6.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik mencakup serangkaian pilihan atau taktik yang disengaja yang dirancang oleh individu atau kolektif dengan tujuan mencapai tujuan masyarakat tertentu. Biasanya badan atau lembaga pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan publik tersebut

(Taufiqurokhman, 2014). Kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Winarno (2004), adalah rencana tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Jalur tindakan ini menimbulkan masalah dan kemungkinan, dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik memberikan pengaruh yang besar terhadap individu, sebagaimana dikemukakan oleh Gerston (dikutip dalam Fadhillah, 2022), yang menyoroti bahwa pejabat pemerintah di semua tingkatan memanfaatkan kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan publik.

Kebijakan publik, menurut pandangan masyarakat umum, umumnya dipahami sebagai kumpulan norma dan aturan resmi yang mengatur perilaku di ruang publik. Selain itu, hal ini dianggap oleh sebagian orang sebagai reaksi pemerintah terhadap suatu isu atau kekhawatiran tertentu (Buyung, 2016). Meskipun studi tentang kebijakan publik menjadi terkenal pada pertengahan tahun 1960an dalam bidang Administrasi Publik dan Ilmu Politik, asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal peradaban manusia.

Pada zaman dahulu, terdapat hubungan yang kuat antara keberadaan pribadi dan kebijakan publik, yang berdampak pada individu dan masyarakat secara keseluruhan (Bakry, 2015). Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dirumuskan oleh badan dan pejabat pemerintah (Al-Azkiya, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik secara intrinsik berhubungan dengan tindakan dan upaya lembaga dan pejabat pemerintah.

1.6.1.2. Tahapan atau Siklus Kebijakan Publik

Kebijakan publik mengacu pada keputusan yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh mereka yang menduduki posisi kekuasaan publik pada tingkat strategis atau luas (Mustari N., 2015). Biasanya orang-orang yang memegang otoritas politik, yang dipilih oleh publik melalui cara-cara demokratis, adalah pencipta kebijakan publik (Nuryati, 2015). Merumuskan kebijakan publik merupakan suatu pekerjaan yang kompleks, ditandai dengan dimasukkannya berbagai elemen dan variabel, sehingga menyebabkan para profesional politik menyelidiki analisisnya secara ekstensif. Para profesional ini sering membagi proses pengembangan kebijakan publik ke dalam tahap-tahap terpisah untuk memungkinkan analisis menyeluruh. Penting untuk disebutkan bahwa urutan terjadinya proses ini mungkin berbeda antar spesialis (Suharno, 2010).

Menurut Budi Winarno (2007) Tahap-tahap dalam pembuatan Kebijakan Publik dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini, wewenang untuk menentukan isu-isu yang akan dimasukkan dalam agenda publik berada di tangan pejabat yang dipilih dan ditunjuk. Dalam suatu organisasi pemerintahan, ini mungkin dilakukan oleh pejabat tinggi seperti Menteri, Gubernur, atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas isu-isu yang akan dibahas dalam kebijakan publik.

2) Tahap formulasi kebijakan

Pada tahap formulasi kebijakan, pengambil kebijakan, yang dapat mencakup para pejabat pemerintah, analis kebijakan, dan kelompok kerja khusus, berperan dalam mendefinisikan permasalahan dan merumuskan solusi. Proses diskusi dan pertimbangan alternatif kebijakan melibatkan berbagai aktor, dan keputusan akhir untuk memilih suatu kebijakan diambil oleh para pengambil kebijakan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

3) Tahap adopsi kebijakan

Keputusan untuk mengadopsi suatu kebijakan diambil pada tahap ini. Wewenang untuk adopsi kebijakan dapat terletak pada badan legislatif, direktur lembaga, atau lembaga peradilan, tergantung pada sistem politik dan struktur pemerintahan suatu negara. Suara mayoritas atau konsensus mungkin diperlukan untuk mengesahkan suatu kebijakan.

4) Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap implementasi, wewenang untuk menjalankan dan melaksanakan kebijakan ada di tangan unit administratif atau agen pemerintah di tingkat yang lebih rendah. Pelaksanaan kebijakan melibatkan alokasi sumber daya keuangan dan manusia, dan unit administratif ini bertanggung jawab untuk mengoperasikan kebijakan dalam praktiknya. Dalam tahap ini, berbagai kepentingan mungkin bersaing, dan pelaksanaan kebijakan dapat mendapatkan dukungan atau tentangan dari pihak terkait.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap evaluasi kebijakan, wewenang untuk menilai dampak kebijakan dan sejauh mana tujuan telah tercapai dapat dilakukan oleh unit evaluasi atau lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan. Penetapan kriteria dan pengukuran dilakukan untuk menilai keberhasilan kebijakan, dan hasil evaluasi ini dapat memberikan masukan untuk pembaharuan atau perubahan kebijakan di masa mendatang.

1.6.1.3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi suatu kebijakan merupakan tahapan krusial dalam proses pembuatan Kebijakan Publik yang lebih luas. Istilah “implementasi” berasal dari bahasa Inggris dan mengacu pada proses melaksanakan atau menerapkan sesuatu. Implementasi mencakup penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan apa pun dengan hasil yang saling berpengaruh. Hal ini mencakup pelaksanaan tindakan yang menghasilkan hasil yang signifikan atau penting, biasanya terlihat dalam bentuk peraturan, keputusan, dan kebijakan (Sobirin, 2017).

Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada pelaksanaan tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan dalam suatu keputusan, yang merupakan langkah penting dalam proses pengambilan keputusan. Setiap kegiatan harus sesuai dengan proses pelaksanaannya. Menurut Syauckani dkk (2004:295), implementasi adalah proses pelaksanaan serangkaian kegiatan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, implementasi merupakan langkah awal terciptanya suatu peraturan yang mengartikan suatu program kebijakan. Selain itu, distribusi sumber daya keuangan dan penentuan individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut merupakan faktor penting. Hal ini merupakan pendekatan awal untuk menerapkan kebijakan konkrit bagi masyarakat umum. Proses penerapannya lebih dari sekedar tindakan entitas administratif yang bertanggung jawab atas program dan mendorong kepatuhan di antara penerima yang dituju. Hal ini mencakup sistem kompleks yang terdiri dari faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung membentuk tindakan semua pihak yang terlibat dalam menentukan jalur dimana kegiatan pemerintah dapat mencapai tujuan kebijakan publik.

Teori Implementasi Kebijakan George Edward III menekankan pentingnya implementasi kebijakan sebagai fase transisi antara pembuatan kebijakan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat yang terkena dampak. Langkah implementasi dinilai krusial karena sekalipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan baik, namun tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai. Di sisi lain, jika kebijakan itu sendiri tidak disusun dengan baik, maka persiapan dan perencanaan yang memadai untuk

implementasi kebijakan mungkin akan sia-sia. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan dan merencanakan desain dan implementasi kebijakan secara cermat dan menyeluruh untuk mencapai tujuan kebijakan (Nurani, 2009).

Proses penerapan kebijakan baru memerlukan penetapan tujuan dan sasaran secara jelas, perancangan program, dan pengalokasian dana untuk mencapai target tersebut. Lester dan Stewart berpendapat bahwa implementasi mencakup aspek prosedural dan produk yang dihasilkan. Efektivitas implementasi kebijakan dinilai dengan memeriksa elemen prosedural dan pencapaian hasil akhir, untuk menentukan apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai (Nastia, 2014). Implementasi Kebijakan Publik merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan publik yang lebih luas sehingga memerlukan kajian yang mendalam. Pentingnya implementasi kebijakan terletak pada kenyataan bahwa meskipun suatu kebijakan berkualitas tinggi, namun jika implementasinya tidak dipersiapkan atau direncanakan dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak mungkin tercapai, begitu pula sebaliknya (Pratama, 2013).

Dalam pendekatan yang diterapkan oleh George Edward III dalam (Nurani, 2009) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting untuk implementasi kebijakan karena mencakup transfer informasi, ide, keterampilan, aturan, dan faktor terkait lainnya kepada pihak-pihak yang diperlukan. Efektivitas implementasi kebijakan tergantung pada pemahaman tugas orang-orang yang diberi

kepercayaan untuk melaksanakan keputusan. Proses komunikasinya harus tepat dan dipahami secara menyeluruh oleh para pelaksana. Instruksi yang jelas sangat penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Edward III menggambarkan tiga komponen utama dalam proses komunikasi kebijakan: transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam melaksanakan kebijakan, dan penting untuk memiliki jumlah orang yang kompeten dalam jumlah yang cukup untuk memastikan implementasi kebijakan yang efisien. Memiliki sumber daya manusia yang memadai, yang memenuhi kualifikasi yang relevan, memastikan bahwa para pelaksana mempunyai kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara efektif.

3. Struktur Birokrasi

Birokrasi memainkan peran penting dalam menjalankan kebijakan dengan sengaja atau tidak sengaja memilih struktur organisasi untuk mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat kontemporer. Birokrasi sengaja dibentuk untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Edward III mengidentifikasi dua ciri utama birokrasi: adanya standar proses kerja atau prosedur operasi (SOP) dan kecenderungan fragmentasi. Prosedur Operasi Standar (SOP), yang dibuat sebagai solusi internal untuk mengatasi kendala waktu dan sumber daya, berupaya mencapai konsistensi dalam operasi organisasi yang rumit. Meskipun Prosedur

Operasi Standar (SOP) mungkin menghambat penerapan kebijakan baru yang memerlukan perubahan dalam praktik organisasi, prosedur tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memiliki prosedur perencanaan dan pengendalian yang efektif, sehingga memfasilitasi penyesuaian yang lebih baik terhadap tanggung jawab baru.

4. Disposisi

Pola pikir atau sikap para pelaksana kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Efisiensi dalam implementasi kebijakan memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai tugas-tugas dan kapasitas untuk melaksanakannya secara tidak memihak dalam praktiknya.

Hal-hal yang perlu dicermati pada variable disposisi adalah:

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Insentif

George Edward III menyarankan bahwa salah satu metode yang mungkin untuk mengatasi kesulitan penerapan tren adalah dengan memodifikasi insentif. Oleh karena itu, individu sering

kali bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, dan akibatnya, pembuat kebijakan dapat mempengaruhi perilaku mereka yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dengan memanipulasi insentif. Dengan memberikan imbalan atau hukuman yang ditargetkan, kita dapat membangun dorongan motivasi yang mendorong para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah secara efisien.

1.6.2. Kebijakan Publik dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Indonesia berfungsi dalam struktur negara sosialis-demokratis, dimana negara dipandang sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di kalangan penduduknya. Indonesia menerapkan sistem yang menerapkan kebijakan, seperti penggunaan kartu kesejahteraan, untuk membangun jaring pengaman sosial, dengan tujuan menawarkan perlindungan sosial kepada individu yang membutuhkan bantuan. Jaring pengaman sosial di Indonesia sejalan dengan gagasan negara kesejahteraan sosial (Hadiyono, 2020).

Negara kesejahteraan didefinisikan sebagai pemerintah yang mengemban tugas menciptakan dan menerapkan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman mencakup beberapa bentuk dukungan, seperti asuransi, bantuan keuangan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, dan jaminan pensiun. Dalam konteks negara kesejahteraan, gagasan ini berfungsi sebagai taktik untuk mengatasi ambang kemiskinan yang ada di berbagai negara, khususnya di Indonesia (Setiyono, 2018). Selaras dengan gagasan negara kesejahteraan, berbagai strategi

untuk mengatasi kemiskinan melibatkan sektor perpajakan, lapangan kerja, pensiun, dan kesehatan. Strategi-strategi ini mencakup langkah-langkah seperti perlindungan kecelakaan kerja, asuransi sosial, layanan kesehatan nasional, dan penetapan program perpajakan yang adil dan efektif (Alexander, 2009). Penerapan ideologi negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan penting yang menjadikannya sebagai sarana untuk memitigasi kesenjangan yang disebabkan oleh ekonomi pasar (Iskandar, 2021). Sukmana (2016) menilai gagasan tersebut merupakan pendekatan yang paling tepat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun Indonesia menerapkan pendekatan negara kesejahteraan terbatas dengan anggaran belanja sosial yang moderat, Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Hadiyono, 2020). Namun, negara ini mempunyai banyak kendala dalam mencapai kesejahteraan sosial. Namun, Indonesia terus memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat regional (Karim, 2017). Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Indonesia harus mengatasi permasalahan tersebut dengan mendorong kerja sama antara pemerintah dan masyarakat (Putra, 2022).

Terbentuknya negara kesejahteraan di Indonesia merupakan hasil langsung dari penerapan kebijakan publik, yang merupakan perwujudan gagasan pemerintah proaktif yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan menjamin hak-hak tertentu. Dalam kerangka ini, baik pemerintah pusat maupun daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan publik dan melaksanakan inisiatif sosial yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik komunitas masing-masing. Negara kesejahteraan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mencakup pengawasan pemerintah atas tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam (Elviandri, et al., 2019).

1.7. Operasionalisasi Konsep

Beberapa indikator penelitian sebagai berikut:

a. Implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera

1) Verifikasi dan Validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Proses ini melibatkan pengecekan dan konfirmasi data calon penerima bantuan untuk memastikan kebenaran informasi yang tercantum di dalam Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS). Tujuan verifikasi dan validasi adalah untuk menjamin bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan diberikan kepada individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan.

2) Pengusulan Calon Penerima Bantuan Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Langkah ini melibatkan pengajuan kandidat atau calon penerima bantuan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau pihak terkait yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi dan kebutuhan warganya. Pengusulan dilakukan agar program dapat mencakup individu atau keluarga yang sebenarnya membutuhkan bantuan, dan pengusulan ini seringkali merupakan langkah awal dalam proses seleksi penerima manfaat.

3) Daftar Penerima Bantuan Jaminan Sosial Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, daftar resmi penerima bantuan (Daftar Penerima Bantuan atau DPB) dibuat. DPB mencakup nama-nama individu atau keluarga yang memenuhi syarat untuk menerima Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Daftar ini menjadi acuan dalam penyaluran bantuan dan memastikan bahwa bantuan sosial diberikan pada penerima yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

4) Penyaluran Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Proses penyaluran melibatkan pendistribusian fisik Kartu Jawa Tengah Sejahtera kepada penerima yang terdaftar dalam DPB. Penyaluran ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti petugas distribusi atau agen yang memastikan kartu sampai ke tangan penerima dengan aman dan tepat waktu. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang telah diidentifikasi dan diverifikasi dapat diakses oleh penerima dengan efisien.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera

1) Komunikasi dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Komunikasi dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mencakup semua interaksi komunikatif yang dilakukan oleh Kepala

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan implementasi kebijakan. Ini termasuk penyampaian arahan, pedoman, dan informasi kepada staf di bawahnya, serta berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait eksternal, seperti pemerintah daerah, masyarakat, atau lembaga terkait.

2) Sumber Daya dari Pegawai Bidang Perlindungan Sosial dan Data Penyuluhan

Sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan, pengetahuan, dan keahlian dari pegawai di Bidang Perlindungan Sosial. Hal ini mencakup kapasitas mereka dalam mengelola data, menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat terkait program perlindungan sosial, dan memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan relevan.

3) Struktur Birokrasi dari Kepala Seksi Jaminan Sosial

Struktur Birokrasi dari Kepala Seksi Jaminan Sosial mencakup organisasi dan hirarki di dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terutama fokus pada struktur kepemimpinan di tingkat seksi. Kepala Seksi Jaminan Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dalam konteks jaminan sosial. Struktur ini mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antarunit kerja.

4) Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan dari Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial dan Camat Boja

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan dari Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial dan Camat Boja mencakup sikap, keyakinan, dan pandangan dari para pelaksana kebijakan di Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial serta Camat Boja. Sikap positif dan komitmen terhadap tujuan kebijakan dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan diimplementasikan dengan efektif. Disposisi yang baik juga dapat mencakup kemauan untuk beradaptasi dengan perubahan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan dan strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan memperoleh pengetahuan atau pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena atau tema penelitian. Metode penelitian mencakup langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang ditentukan.

1.8.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya mengadopsi jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif melibatkan pemahaman fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik. Memanfaatkan deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks alami tertentu, dengan menggunakan berbagai metode alami (Moleong, 2017). Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi alam objek dan peneliti sebagai instrumen

utama. Pengumpulan data melibatkan triangulasi (kombinasi), dan analisisnya bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2016).

Penelitian Jawa Tengah berupaya untuk menggambarkan persoalan tidak meratanya persebaran Kartu Jateng Sejahtera di Kabupaten Kendal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan solusi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Kendal, dan Pemerintah Kabupaten Kendal—khususnya Pemerintah Kabupaten Boja—untuk mengatasi permasalahan distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera di wilayah yang berbeda. Kabupaten Kendal, dengan fokus khusus di Kecamatan Boja.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di:

1. Pemerintah Kecamatan Boja Jl. Pramuka No.7 Dusun Gedangan, Desa Boja.
2. Dinas Sosial Kabupaten Kendal Jl. Tentara Pelajar, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Kendal, Kab. Kendal.
3. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No.12 Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subyek di dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kecamatan Boja, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan Pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Pada penelitian ini kedua subyek penelitian memiliki peran yang penting sebagai informan dalam melakukan pencarian data penelitian ini. Untuk informan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Kendal sendiri yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Bidang Perlindungan Sosial dan Data Penyuluhan
2. Pegawai Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial

Untuk informan dari pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sendiri yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Kepala Seksi Jaminan Sosial

Untuk informan dari pihak Pemerintah Kabupaten Kendal sendiri yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Camat Boja.

1.8.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber langsung yaitu dari informan kepada pengumpul data dalam hal ini peneliti. Untuk mendapatkan data primer ini terdapat beberapa macam cara yang dapat digunakan yaitu melalui hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung tanpa melalui perantara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Di dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu berupa jurnal, dokumen, laporan, artikel, data ataupun bahan bacaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara pada dasarnya adalah dialog yang terjadi antara dua individu atau lebih. Partisipan dalam wawancara terdiri dari pewawancara dan narasumber. Pertemuan adalah suatu forum di mana dua individu berpartisipasi dalam sesi tanya jawab terstruktur untuk berbagi informasi atau gagasan, dengan tujuan mencapai resolusi atau saling pengertian mengenai suatu topik tertentu (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap informan penelitian untuk mengetahui sebaran Kartu Jateng Sejahtera di Kabupaten Kendal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung individu dan objek yang diteliti. Penelitian ini fokus untuk mengkaji langkah-langkah yang dilakukan pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam mengatasi permasalahan terkait pembagian Kartu Jateng Sejahtera. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas keluhan warga Kabupaten Kendal mengenai ketimpangan pembagian kartu. Tindakan tambahan yang diamati meliputi proses penyaluran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik penelitian dimana peneliti mencatat data yang sudah ada sebelumnya secara sistematis. Metodologi ini mengharuskan peneliti untuk secara cermat memilih dan menyusun data yang relevan dengan subjek penelitian. Data penelitian ini akan diperoleh dengan menggali informasi dari laporan atau sumber lain yang relevan. Penelitian tersebut meliputi pemahaman dan pencatatan berbagai dokumen antara lain Laporan Anggaran Kartu Jateng Sejahtera Kabupaten Kendal, laporan penyaluran Kartu Jateng Sejahtera, data masyarakat yang berhak menerima Kartu Jateng Sejahtera, informasi terkait Bansos, dan dokumen yang menguraikan struktur organisasi dan standar operasional prosedur Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian "Implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 2020-2022" menggunakan teknik triangulasi data Miles Huberman dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:

1) Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait implementasi KJTS di Kecamatan Boja. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti petugas pelaksana program, penerima manfaat, dan pihak terkait lainnya. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang pelaksanaan program. Selain itu, data sekunder seperti dokumen kebijakan dan laporan implementasi juga dianalisis.

2) Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam dengan menggunakan metode triangulasi data. Hal ini melibatkan perbandingan dan penyelarasan data dari berbagai sumber untuk memverifikasi dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Teknik analisis ini membantu mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan konvergensi informasi dari berbagai sumber,

meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian. Data kualitatif dan kuantitatif dieksplorasi untuk memahami implementasi KJTS secara holistik.

3) Interpretasi Hasil

Setelah analisis data selesai, hasilnya diinterpretasikan dengan merinci temuan utama, pola, dan hubungan antarvariabel. Interpretasi dilakukan dengan merujuk pada kerangka teoretis dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang ditarik bersifat komprehensif dan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi KJTS di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal selama periode 2020-2022. Kesimpulan ini kemudian dapat dihubungkan kembali dengan tujuan penelitian dan memberikan kontribusi pada pemahaman terkait kebijakan tersebut.